

Pengelolaan Sampah Plastik sebagai Ancaman Keamanan Maritim di Indonesia di Kabupaten Pandeglang

Laode Muhamad Fathun
I Nyoman Aji Suadhana Ray

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: Laodemuhammadfathun@upnvj.ac.id

Abstract

This research purpose the issue of maritime security through. One of the maritime security issues in Indonesia is the issue of waste management at sea. As a country that wants to establish itself as the world's maritime axis, it should make waste at sea an important issue and need serious attention. Research from Ocean Conservancy reports that around 8 million tons of plastic pass into the sea every year. If the condition cannot be controlled, by 2025 about 1 ton of plastic waste will be found in every 3 tons of fish taken from the sea. This research was conducted in Pandelega Region, Banten Province from May to December 2019. This study wanted to look at the marine waste management challenge in Pandeglang District and its completion strategy. With the case study method through a qualitative research paradigm with data collection techniques, field observations, interviews, and literature review, the results were obtained while that waste management in Pandeglang Region has not been a government priority. The government is still focusing on poverty, education and health issues. To 2020 and has been included in the regional strategic plan. Challenges obtained in waste management are problems of policy orientation, economic problems, cultural issues, and resources. For this reason, hopefully this study can be useful for many parties, including government, academia, students and the community.

Keywords: Maritime Security, Plastic Waste, Security threats

Penelitian ini bertujuan membahas masalah keamanan maritim. Salah satu masalah keamanan maritim di Indonesia adalah pengelolaan limbah laut. Sebagai negara yang ingin menjadikan dirinya sebagai poros maritim dunia, Indonesia harus menjadikan limbah laut sebagai masalah penting dan perlu perhatian serius. Penelitian dari Ocean Conservancy melaporkan bahwa sekitar 8 juta ton plastik masuk ke laut setiap tahun. Jika kondisinya tidak dapat dikendalikan, pada tahun 2025 sekitar 1ton sampah plastik akan ditemukan di setiap 3ton ikan yang diambil dari laut. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Pandeglang, Provinsi Banten dari Mei hingga Desember 2019. Penelitian ini ingin melihat tantangan pengelolaan limbah laut di Kabupaten Pandeglang dan strategi penyelesaiannya. Dengan metode studi kasus melalui paradigma penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, observasi lapangan, wawancara, dan tinjauan pustaka,

hasilnya diperoleh sementara pengelolaan limbah di Wilayah Pandegelang belum menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah masih fokus pada masalah kemiskinan, pendidikan dan kesehatan sampai tahun 2020 dan telah masuk dalam rencana strategis regional. Tantangan yang diperoleh dalam pengelolaan limbah adalah masalah orientasi kebijakan, masalah ekonomi, masalah budaya, dan sumber daya. Atas dasar itu, semoga studi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, termasuk pemerintah, akademisi, mahasiswa dan masyarakat.

Katakunci: Keamanan Maritim, Sampah Plastik, Ancaman Keamanan.

Pendahuluan

Negara-negara di dunia belum mampu mendefinisikan konsep keamanan maritim yang tunggal. Hal tersebut dikarenakan keamanan maritim mengandung banyak korelasi dengan bidang lain. Konsep keamanan membentang luas mencakup berbagai bidang, seperti lembaga pemerintah, hukum, keamanan dan pertahanan, kebijakan, industri pelayaran, dan sebagainya. Konsekuensinya membuat batasan keamanan maritim menjadi ambigu. Konsep Keamanan maritim seperti *buzzword* yang tidak memiliki definisi tunggal tergantung kesepakatan pengertian setiap institusi, individu dalam memberikan batasan definisi. Lebih lanjut, esensi isu keamanan maritim terkoneksi dengan sejumlah ancaman bahkan keamanan maritim merupakan situasi kemampuan negara dalam menjaga wilayah lautnya¹.

IMO sebagai organisasi maritim sendiri membatasi konsep keamanan maritim bermakna pada *safety* yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran yang diakibatkan oleh keteledoran manusia. IMO juga mengatakan keamanan maritim mencakup *security* yang berhubungan dengan keamanan di laut baik kapal, manusia atau bebasanya ancaman dari aktivitas di laut. Akibat bentangan definisi yang luas tentang keamanan maritim. Oleh karena itu, keamanan maritim merupakan kajian yang berfokus pada sengketa batas negara, konflik angkatan laut antar negara. Lebih lanjut, keamanan maritim juga identik dengan tata kelola sumber daya di laut, pelayaran internasional, dan kejahatan lintas negara.² Ada pula definisi lain yang menyatakan bahwa keamanan maritim menyangkut isu batas maritim, penyelundupan, perompakan, terorisme maritim, dan *illegal fishing*. Sebagai kesimpulan, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon

¹ Christian Bueger, "What is Maritime Security?" *Marine Policy*. (2015); Lihat juga Lutz Feldt, Peter Roell, and Ralph D Thiele, *Maritime Security: Perspectives for a Comprehensive Approach* (Berlin : IPSW, 2013), 2.

² Susanto dan Dicky R Munaf, *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut, Berbasis Sistem Peringatan Dini* (Jakarta: Gramedia, 2015).

memberikan batasan keamanan maritim yang tertuang dalam *Report on Oceans and the Law of the Sea*. Dalam laporan ini, ancaman keamanan maritim meliputi, yaitu perompakan dan serangan bersenjata terhadap kapal; aksi terorisme terhadap pelayaran, instalasi lepas pantai, dan infrastruktur lainnya; penyelundupan narkoba dan psikotropika secara ilegal; penyelundupan manusia melalui laut; *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*; dan aktivitas yang mencedera lingkungan bahari.³

Barry Buzan memberi batasan yang luas terhadap bentangan isu kajian maritim yang dikatakannya sebagai *securitization*. Salah satu fakta dari studi ini adalah meluasnya kajian maritim yang mencakup seluruh bagian kehidupan dan aktifitas di laut atau *security landscape*. Buzan mengatakan bahwa bentangan itu mencakup bidang sosial, keamanan dan pertahanan, ideologi, ekonomi dll. Lebih lanjut, Bueger menyampaikan bahwa beberapa isu yang lagi hangat dalam kajian maritim diantaranya menjadi rezim kajian maritim yaitu: *international peace and security, sovereignty, territory and political independent, security from crimes at the sea, resource security, environmental security, security seafarers and fishers*⁴ Sehubungan dengan fondasi dasar kajian maritim tersebut, kajian ini mencakup dua hal yakni isu *environmental security, security seafarers and fishers* terutama isu sampah plastik yang berkonsekuensi terhadap lingkungan laut dan kualitas pendapatan dan hasil tangkap nelayan di laut. Problem ini menjadi semakin diperparah dengan adanya impor sampah ke Indonesia. Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris dan termasuk Tiongkok melakukan ekspor sampahnya ke Indonesia.

Beberapa wilayah yang menjadi lokasi impor tersebut adalah Batam, Mojokerto. Indonesia telah mengembalikan sampah plastik tersebut karena tidak memenuhi standar hukum Indonesia diantaranya adalah pemisahan sampah plastik dan bahan beracun dan berbahaya. Konsekuensinya hubungan antar negara pun bisa saja merenggang akibatnya hal ini. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan Tiongkok yang tidak lagi menerima impor sampah plastik oleh negara-negara besar karena alasan lingkungan. Di sisi lain wilayah ASEAN menjadi tempat yang baik untuk menyimpan sampah dunia walaupun sudah ditentang oleh beberapa pemimpin di ASEAN seperti Duterke.

Konsumsi sampah Indonesia sendiri masih mencapai 30 persen dan Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi volume sampah sampai 70 persen di tahun 2025, sebagaimana disampaikan Presiden

³ UN General Assembly 2008, part. 39.

⁴ Bueger, *What is Maritime Security*.

Jokowi di G20 Summit di German. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah melakukan rapat terbatas tentang pengelolaan sampah yang tidak mengalami progres dengan melibatkan *stakeholders*. Pengurangan volume sampah tersebut dapat dilakukan dengan proses daur ulang sampah plastik menjadi sumber energi. Pengelolaan sampah plastik menjadi sumber energi sedang dilakukan di Provinsi Jawa Barat dan PT. Pertamina untuk menjadikan sampah sebagai energi alternatif dalam penyuplai listrik nasional dan daerah.

Akan tetapi tidak semua *stakeholders* memiliki orientasi yang sama. Walikota Bogor misalnya dengan kebijakannya melakukan bersih-bersih sampah juga menjadi salah satu rujukan daerah terutama di wilayah pesisir. Hal ini tidak sejalan dengan Kabupaten Pandeglang yang merupakan wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan beberapa laut lain yang berpotensi menjadi sumber datangnya sampah di lautan. Kabupaten Pandeglang masih belum menjadikan pengelolaan sampah sebagai orientasi kebijakan strategis daerah. Kabupaten Pandeglang masih menjadikan kemiskinan, pendidikan, sumberdaya manusia, infrastruktur serta tata kelola pemerintahan sebagai orientasi kebijakan.

Fakta di lapangan pasca terjadinya tsunami tahun 2018 di Kabupaten Pandeglang, karena kurang tanggapnya tata kelola mengakibatkan sampah plastik merambah kedarat yang terbawa oleh air. Ada sekitar 4ton sampah yang terbawa oleh air kedarat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah plastik belum optimal terutama wilayah pesisir Kabupaten Pandeglang. Menurut Balitbang Kabupaten Pandeglang yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 bahwa isu pengelolaan sampah plastik belum menjadi orientasi kebijakan pemerintah daerah. Hal ini diakibatkan pemerintah fokus padaisu krusial seperti pendidikan, kemiskinan, sanitasi. Isu sampah hanya berhubungan dengan budaya. Lebih lanjut, Andi yang merupakan peneliti Balitbanag Kabupaten Pandeglang menyatakan bahwa “kami kesulitan mengontrol kebiasaan masyarakat di daerah terutamawilayah pasar dan pesisir. Masyarakat sudah terbiasa dengan budaya yang berlaku selama ini. Konsekuensinya pengelolaan sampah yang belum optimal berdampak pada bidang sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat pesisir.

Dengan demikian penelitian ini akan menjawab masalah tantangan pengelolaan sampah plastik di Kabupaten Pandeglang tinjauan keamanan maritim. Penelitian ini bertujuan untuk melihat urgensi pengelolaan sampah plastik di Kabupaten Pandeglang. Aspek kabaharuan dari penelitian ini adalah melihat pengelolaan isu sampah plastik dalam konteks mikro yang berkonsekuensi dalam tataran makro

baik level negara, maupun regional. Penelitian ini mencari permodelan pengelolaan sampah plastik di tingkat daerah, sebab saat ini terutama beberapa wilayah sedang mengkhawatirkan isu sampah plastik. Dengan permodelan ini bisa menjadi rekomendasi jika pengelolaan sampahnya sangat baik. Namun apabila ditemukan pengelolaan sampah plastiknya belum optimal maka bisa menjadi bahan kajian untuk menjadikan isu ini sebagai rekomendasi kebijakan strategis daerah dan nasional. Sebab Indonesia sedang gencar mencanangkan anti sampah plastik yang sudah dipraktikkan di beberapa daerah.

Tinjauan Pustaka

Konsep Keamanan Maritim

Perdebatan tentang konsep keamanan maritim terdapat dua aliran pemikiran yaitu kerangka *de-securitization* atau kaum tradisional, berfokus pada kontestasi antar negara beserta ancaman yang ditimbulkannya dan kelompok non-tradisional (*securitization*) yang memperluas jangkauan definisi keamanan nasional hingga *human security* atau kekacauan yang ditimbulkan oleh aktivitas aktor yang berdampak nasional maupun internasional. Kelompok ini mengidentifikasi konsep ancaman keamanan meluas hingga berkaitan dengan identitas, agama, suku, penyakit lingkungan dan lain sebagainya. Dengan demikian, meluasnya objek kajian keamanan akan merubah format pengelolaan keamanan nasional dan internasional termasuk keamanan maritim.⁵

Keamanan maritim sebagai kondisi di mana tidak ada "ancaman" maritim (*absenc of threats*) seperti sengketa antar negara; aksi terorisme di laut; pembajakan; perdagangan narkoba, manusia, dan barang-barang selundupan; proliferasi senjata; IUU *fishing* (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); kejahatan lingkungan; serta bencana dan kecelakaan laut. Memperjelas pandangan tersebut, definisi lainnya menyatakan bahwa keamanan maritim juga perlu dimaknai lebih dari sekedar *absence of threats*, tetapi juga termasuk kondisi yang diiringi oleh terciptanya stabilitas (*stable order*) di laut⁶. Lebih lanjut, Bueger mengatakan ada dua pendekatan melihat keamanan maritim yakni pendekatan yang fokus pada isu-isu yang dianggap sebagai ancaman keamanan maritim, dan pendekatan yang berfokus pada stabilitas

⁵ Makmur Keliat, "Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia," *Ilmu sosial dan Ilmu Politik*, Volume.13, No.1 (Juli 2009): 113.

⁶ Bueger, *What is Maritime Security*.

di laut (*stable of the sea*). Pendekatan pertama berhubungan dengan isu ancaman tradisional dan ancaman non tradisional. Kemudian pendekatan kedua berfokus upaya capaian menjaga stabilitas wilayah maritim melalui pendekatan hukum.

Ada definisi terperinci tentang keamanan maritim itu sendiri namun IMO mendefinisikan keamanan maritim pada dua aspek yakni *maritime security* merujuk pada perlindungan terhadap aktifitas di lautan dan kebebasan mengarungi lautan. Sedangkan *maritime safety* menyangkut tentang meminimalisir kecelakaan di laut berupa tidak terstandarisasi kapal, atau perilaku *human error*.⁷ Meskipun konsensus mengenai definisi keamanan maritim belum tercapai, dapat diamati bahwa terdapat beberapa karakteristik umum terkait keamanan maritim. Beberapa karakteristik tersebut ialah: (i) ancaman terhadap keamanan maritim tidak terikat batas-batas negara, dan karena itu membutuhkan kerja sama internasional; (ii) keamanan maritim bersifat luas, tidak hanya berasal dari kekuatan militer dan berfokus pada aktor negara; dan (iii) ditentukan oleh persepsi suatu negara akan apa yang dianggapnya berpotensi mengancam stabilitas keamanan maritim. Pada poin ketiga bahwa keamanan maritim merupakan sebuah konstruksi sosial atau persepsi maknanya adalah pendekatan sekuritisasi ini dapat berarti dua hal. Yang pertama ialah bahwa "maritim" itu sendiri dijadikan suatu isu yang disekuritisasi menjadi isu keamanan. Yang kedua ialah bagaimana isu-isu yang berbeda disekuritisasi untuk membentuk "keamanan maritim."

Mayoritas aktor-aktor internasional mendefinisikan keamanan maritim dengan mengidentifikasi sejumlah ancaman yang termasuk dalam konsep keamanan maritim tersebut. Hal ini berhubungan dengan kekuasaan politik dapat mengkonstruksi isu menjadi sebuah ancaman keamanan atau disebut dengan *speech act*. Operasionalisasi konseptual ini akan dimkebangkan melalui ancaman keamanan maritim yang bersifat non tradisional⁸. Lebih lanjut,

Maritime Security" is a responsibility, which has no clear definitions when it comes to Maritime Security Operations: it is a governmental responsibility, but the authority to act on behalf of a state is a sovereign decision with different options. This has a strong influence on Maritime Collaboration. It has no universal legal or agreed definition due to the fact that it is a broad topic, covering many policy sectors. Elements,

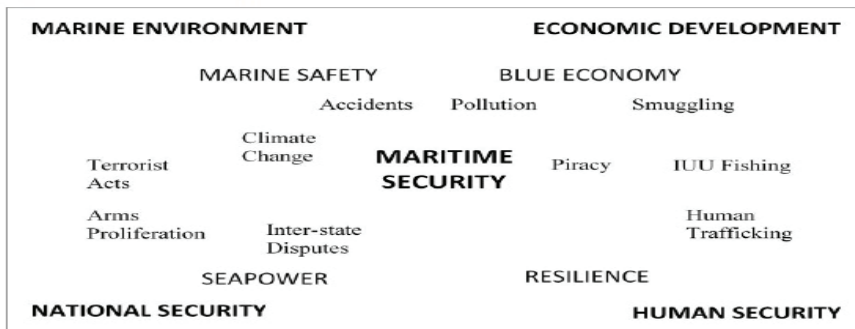
⁷ Angga Nurudin Rachmat, *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

⁸ Bueger, *What is Maritime Security*.

which are part of maritime security, are: a) International and national peace and security b) Sovereignty, territorial integrity and political independence c) Security of Sea Lines of Communications d) Security protection from crimes at sea e) Resource security, access to resources at sea and to the seabed f) Environmental protection g) Security of all seafarers and fishermen.

Berikut adalah domain dari keamanan maritim (Bueger ,2015):

Figure 1: Maritime Security Matrix



Dari gambar di atas bisa disimpulkan bahwa penelitian ini menyangkut tentang *Marine Enviromental dan Economic Development*. Domain dari ancaman lingkungan berhubungan dengan perubahan lingkungan, polusi, yang berkonsekuensi pada pembangunan ekonomi dilaut atau dikenal dengan pendekatan ekonomi biru. Hal ini juga berkonsekuensi pada kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, sehingga, keamanan maritim akan berhubungan dengan keamanan manusia yang dikatakan oleh UNDP memiliki tujuh indikator.

Review Literatur

Pengelolaan sampah menjadi pembicaraan hangat dalam isu hubungan internasional kontemporer. Penelitian yang dipimpin oleh Jenna R Jambeck dari Universitas Georgia melaporkan hasil risetnya dalam *journal science* tahun 2015 menemukan bahwa ada sekitar 192 negara yang belum maksimal dalam pengelolaan sampah plastik terutama yang tersebar di lautan. Indonesia sebagai negara yang memiliki luas lautan yang besar menempati posisi kedua terhadap buruknya pengelolaan sampah plastik di lautan. Beberapa negara yang masih belum maksimal dalam pengelolannya adalah Tiongkok dengan 8,8 juta ton, Indonesia dengan 3,2 juta ton, Filipina dengan 1,9 juta ton, Vietnam dengan 1,8 juta ton dan SriLangka dengan

1,6 juta ton. Terkhusus Indonesia 83 persen pengelolaanya belum baik dan akibatnya menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan terutama di laut. Lebih lanjut, data yang dirilis oleh *Ocean Conservancy* bahwa ada sekitar delapan ton sampah plastik yang lolos ke laut dan terdapat satu ton sampah dari hasil tangkap ikan. *World Bank* juga merilis data bahwa adasekitar 1,3 t miliar ton sampah plastik terkumpul di sejumlah kota di dunia. *World Bank* juga memprediksi sampai tahun 2025 terdapat 2,2 milyar ton sampah plastik yang beredar di dunia.

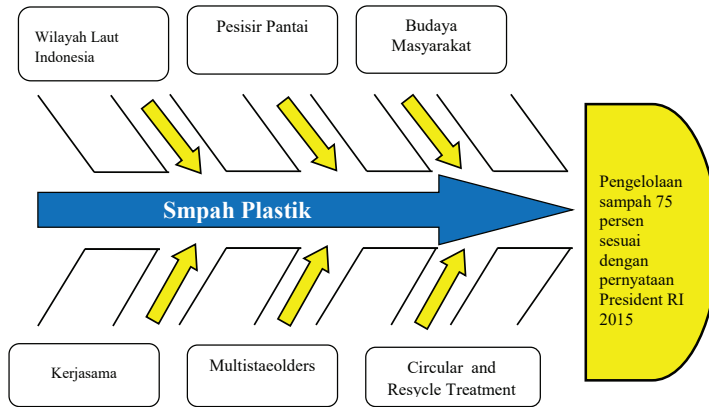
Penelitian dari WALHI⁹ menemukan bahwa setiap orang di dunia menyumbang 700 lembar kantong plastik setiap tahun itu artinya ada sekitar 9 miliar kantong plastik tersebar di dunia setiap tahun dan kebanyakan ada di lautan. Penyebaran sampah plastik ini memiliki berbagai jenis misalnya kantong plastik, botol minuman, popok bayi, bungkus makanan kemasan, dan lainnya. WALHI menemukan bahwa ada sekitar 8 juta ton sampah plastik berbagai jenis yang tersebar di lautan dan tidak terurai serta bercampur dengan Bahan Beracun dan Berbahaya seperti bekas inpus, oli, dan zat beracun lainnya. Sampah plastik tersebut kemudian terapung di lautan dan konsekuensinya mengganggu keamanan maritime terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan nasib nelayan yang hidup di wilayah pesisir laut. Tentunya hal ini akan berkonsekuensi pada hasil tangkap yang kurang baik, karena 1 dari 3 mamalia laut yang ditemukan di laut terinfeksi sampah plastik. Hal ini tentunya mengganggu kemanan manusia dan dampak sosial ekonomi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut.

Metode Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif deskripsi, menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini akan menggunakan tipe observasi partisipan dan pengamatan langsung di wilayah objek penelitian. Untuk memperoleh data peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah aktor yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti juga menggunakan data sekunder dari berbagai referensi ilmiah seperti jurnal dan buku-buku serta internet. Adapun sejumlah tempat yang di kunjungi adalah: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandegelang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandegelang, BAPPEDA Kabupaten Pandegelang, WWF Indonesia, Komunitas Pengelola Daur Ulang Sampah, Masyarakat Pesisir, Mahasiswa KKN

⁹ FGD Seminar Nasional UPN "Veteran" Jakarta 2019.

UGM. Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Pandeglang dan akan berlangsung selama bulan Mei – September 2019. Alur Pemikiran kami sebagai berikut:



Sumber: Karya Pribadi

Pembahasan

Isu Sampah Plastik Lintas Nasional dan Regional

Negara-negara ASEAN saat ini disibukkan dengan impor sampah dari beberapa negara maju. Impor sampah tersebut tentunya memiliki konsekuensi ekonomis dan higienis (lingkungan). Beberapa negara ASEAN yang terkena dampak impor sampah diantaranya adalah Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Hal yang sama dialami oleh Indonesia yang justru menjadi bagian impor sampah negara-negara maju seperti Amerika, Eropa serta Australia. Menurut argumentasi bahwa banyaknya impor sampah di beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia akibat kebijakan Tiongkok. Kebijakan Tiongkok berhenti melakukan impor sampah kepada sejumlah negara termasuk AS dan negara-negara Eropa. Tiongkok adalah salah satu negara terbesar penghasil sampah di dunia bahkan menjadi salah satu negara yang memiliki industri pengolahan sampah daur ulang terbesar di dunia.

Konsekuensinya adalah sejumlah negara maju tersebut harus mencari konsumen baru untuk bisa membeli hasil sampah plastik mereka. Di sisi lain Tiongkok menyatop hal tersebut dengan akumulasi ekonomi sebesar USD 24 miliar per tahun, sehingga industri manufaktur ini berhenti dan berdampak sosial, ekonomi dan lingkungan juga kepada beberapa negara lainnya. Salah satu konsekuensinya adalah terhadap Indonesia. Menurut *The Economist*. Indonesia mengirim balik 5 kontainer berisi sampah ke AS. Menurut Ditjen Bea Cukai yang diterima, menyatakan bahwa lima kontainer

tersebut dikirim melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melalui kapal Zim Dalian menuju pelabuhan Seattle, AS yang akan transit terlebih dahulu ke Shanghai Tiongkok. Bea Cukai menuturkan bahwa lima kontainer tersebut tidak sesuai dengan impor yang dilakukan karena dalam kontainer masih bercampur diantaranya adalah sampah rumah tangga, beracun, dan berbahaya. Kontainer juga berisi plastik, impus, oli bekas, dll. Konsekuensi ini tentunya akan sangat berbahaya bagi kesehatan lingkungan¹⁰.

Menurut Archie Satya Nugroho dari PT. Guna Olah Limbah mengatakan bahwa berhentinya kebijakan Tiongkok terhadap impor sampah selain karena isu lingkungan negara tersebut, kebijakan pemberhentian itu karena mahalnnya *tipping fee*. Di negara-negara maju harga *tipping fee* sangat mahal sedangkan di negara-negara berkembang sangat murah. Sampah di negara-negara maju tidak dipergunakan padahal mereka memiliki teknologi yang modern. Beberapa negara ASEAN seperti Filipina yang pernah mengembalikan berton-ton sampah dari berbagai negara maju harus merevisi kebijakan impor sampahnya. Demikian pula dengan Malaysia, Thailand termasuk Indonesia. Indonesia sendiri sepertinya harus meniru kebijakan sampah yang dilakukan oleh Tiongkok dimana Tiongkok memberlakukan kebijakan sampah yang sudah tercecah untuk bias masuk ke negaranya. Tiongkok mewajibkan setiap sampah yang masuk sudah terpisah dengan sampah yang teridentifikasi bahan beracun dan berbahasaya seperti oli, infus, botol kemasan dll.

Lebih lanjut, negara-negara ASEAN seperti Filipina yang telah mengembalikan 69 kontainer (sekitar 1.500 ton) yang mengandung kontaimen atau bahan berbahaya. Hal yang sama dilakukan oleh Indonesia terhadap Australia, konsekuensinya adalah Australia merasa dirugikan dan mengajukan protes kepada Indonesia karena menolak impor sampahnya. Indonesia sendiri sepakat bahwa impor sampah harus bebas dari bahan berbahaya dan beracun karena memiliki dampak terhadap lingkungan. Australia dipaksa mengikuti aturan Indonesia dan Filipina, apabila tidak melakukan hal tersebut, maka Australia bisa kehilangan pasar di wilayah ASEAN terkhusus Indonesia dan Filipina. Menanggapi hal tersebut, Australia akan berbenah termasuk akan memisahkan sampah impornya menjadi sampah layak daur ulang tidak terkontaminasi dengan bahan beracun dan berbahaya. Australia sendiri tidak menginginkan menggunakan

¹⁰ "Pabrik Pengolahan Limbah Ilegal di Marunda Manfaatkan Oli Bekas Kapal," *Jakarta*, Agustus 19, 2014. <https://news.detik.com/berita/2666221/pabrik-pengolahan-limbah-ilegal-di-marunda-manfaatkan-oli-bekas-kapal/1>

sampah daur ulang untuk produksi barang-barangnya termasuk kosmetik. Konsekuensinya adalah sampah Australia bisa sampai ke Mojokerto.¹¹

Menurut direktur eksekutif Ecoton, Prigi Arisandi, mengatakan bahwa, tingkat kontaminasi mungkin diharapkan murni tidak disengaja, yakni sekitar 2 persen, bukan injeksi sampah yang disengaja untuk dihadapi Indonesia. Tetapi sistem berubah setelah China membuat keputusan bulan Januari 2018 yang menolak sistem daur ulang dunia memasuki China. Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh *Greenpeace* menerangkan bahwa Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina menunjukkan kenaikan hasil impor sampah mencapai 171 persen. Malaysia sendiri hasil impor sampah tahun 2018 mencapai 872.897ton yang naik 300 persen sejak tahun 2016. Sedangkan Indonesia, jumlahnya melonjak hampir 250 persen hanya dalam 12 bulan, dengan kontributor terbesar adalah Amerika Serikat, Kanada, Italia, Korea Selatan, dan Inggris. Kemudian, nama Presiden Rodrigo Duterte mengembalikan 69 kontainer sampah yang ada di Filipina. Dia berpendapat bahwa tidak akan mentolerir terhadap masuknya sampah dunia. Presiden Rodrigo Duterte menyaksikan di pelabuhan Filipina terdapat 2.400ton sampah daur ulang yang telah dilabeli.

Menurut *World Wide Fund for Nature* (WWF) mengatakan, 300 juta ton plastik diproduksi setiap tahun dan sebagian besar berakhir di dalam bumi dan lautan. Fakta lainnya adalah sampah bermasalah ditemukan juga di Batam Kepulauan Riau. Tim gabungan dari Kemenko Maritim, KLHK, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, dan Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Batam menindak lanjuti temuan 65 kontainer sampah. Puluhan container tersebut akan diinvestigasi sehingga tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun. Perwakilan KLHK mengusulkan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Kebijakan impor sampah harus detail, karena apabila tidak bisa dikenakan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tertuang dalam pasal (1) dan (2) dengan hukuman 3-5 tahun, atau dengan biaya denda 100 juta sampai dengan lima milyar.

Analisis Pengelolaan Sampah Plastik

Ancaman keamanan maritim dengan berbasis pendekatan

¹¹ "Sampah Plastik Australia Berakhir di Desa Bangun Mojokerto," Jakarta, Juli 15, 2019. <https://news.detik.com/abc-australia/d-4624297/sampah-plastik-australia-berakhir-di-desa-bangun-mojokerto>

lingkungan lebih besar dikarenakan oleh perilaku manusia atau antroposentrisme. Kelompok diaspora UK juga menyatakan bahwa hal terberat bagi Indonesia adalah membangun budaya yang baik terhadap pemeliharaan lingkungan. Kelompok diaspora tersebut menyatakan bahwa masalah pengelolaan sampah sangat kompleks, namun budaya adalah penentu utama dalam menjaga lingkungan. Hal tersebut berbeda jauh dengan masyarakat di UK yang memaknai lingkungan ekosentrisme.

Dalam pandangan lain untuk memahami ancaman keamanan perspektif Keamanan manusia (*human security*) dianalisis melalui variabel: a) *security for whom*, b) *security for what value*, c) *security for what threat*, dan d) *security by what means*. Perspektif ini adalah perspektif yang memaknai keamanan dari aktor non negara. Ancaman keamanan bukan hanya mengancam negara tetapi juga mengancam aktor non negara atau lebih tepatnya adalah manusia (*human security*)¹². Pada analisis ini, *security for whom* mengacu pada ancaman keamanan bahwa negara harus menjamin keberlangsungan hidup warganya dengan memastikan warganya bebas dari ancaman terutama ancaman lingkungan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian konseptual di atas bahwa lingkungan adalah ancaman nyata saat ini bagi manusia. Variabel ini menekankan pada keamanan warga pesisir terhadap ancaman sampah plastik sangat besar.

Sehubungan dengan hal di atas, Kabupaten Pandeglang juga mengalami hal yang sama dalam pengelolaan sampah plastic. Konsekuensinya seperti yang dikatakan oleh Staf Dinas KKP Propinsi Banten pada saat wawancara bahwa, akibat budaya masyarakat pesisir yang antroposentrisme konsekuensinya adalah menurunnya jumlah tangkapan ikan di laut. Di samping, kualitas air laut di wilayah pesisir yang berubah warnanya seperti tidak biasa. Warna air laut menunjukkan kecoklatan akibat selalu menjadi lokasi pembuangan sampah yang kemudian terbawa oleh ombak hingga ketengah laut. Hal ini akan berpengaruh pula pada hasil tangkap. WWF menyatakan bahwa 1 dari mamalia di laut terindikasi memakan sampah plastik dan hal tersebut apabila dikonsumsi akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan.

Pengelolaan sampah plastik di Kabupaten Pandeglang belum memiliki hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis serta melakukan wawancara langsung dengan beberapa *stakeholders* baik lembaga pemerintah

¹² Yanyan Mochamad Yani, Ian Montratama dan Emil Mahyudin. *Pengantar Studi Keamanan*. (Malang: Intrans Publishing, 2017)

maupun masyarakat setempat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Pandeglang memiliki banyak kendala diantaranya, antara lain:

1. Orientasi kebijakan yang belum menjadikan isu lingkungan seperti sampah sebagai rencana strategis daerah.
2. Kesadaran masyarakat tentang pelestarian ekosistem laut masih sangat rendah dan didukung oleh tingkat pendidikan rata-rata masyarakat yang masih terbatas (SD dan SMP).
3. Infrastruktur dan finansial yang belum maksimal. Fakta di lapangan ditemukan bahwa di pinggir laut hanya terdapat satu tong sampah padahal luas pesisir pantai tidak sebanding dengan hanya satu tong sampah.
4. Sumberdaya manusia yang belum mampu memanfaatkan teknologi untuk mengelola sampah. Fakta di lapangan pengelolaan sampah masih bersifat tradisional atau di buang.
5. Budaya masyarakat yang belum bisa dikontrol oleh pemerintah.



Gambar 1 lokasi pembuangan sampah di Kecamatan Labuan Pandeglang
Sumber: Fotohasil observasi lapangan

Variabel lain adalah *security for what thereat*, pada poin ini mengidentifikasi ancaman sehingga mampu merumuskan solusi dari persoalan tersebut. Hasil pengamatan penulis melalui observasi di lapangan bahwa ancaman keamanan maritim yang terjadi di Kabupaten Pandeglang terkhusus wilayah pesisir ditemukan bahwa asal ancaman masih bersifat lokal. Hal ini terlihat dari gambar di atas yang menunjukkan bahwa potensi akan rusaknya ancaman keamanan lingkungan karena perilaku manusia disekitaran pantai. Perilaku ini kemudian dikatakan antroposentrisme. Para penganut teori hijau mengusulkan bahwa apabila telah terjadi peristiwa seperti itu, maka harus ada kelompok penekan yang bisa menjadi penasehat bagi masyarakat. Penganut teori ini mengusulkan agar ada kolompok LSM yang selalu membimbing masyarakat agar mampu menjaga kelestarian lingkungan. Menurut penganut teori ini menjaga lingkungan harus berbasis kesejahteraan, holistik, keadilan, dan keberlanjutan. Hal ini didasarkan bahwa lingkungan bukan hanya untuk manusia tetapi

untuk makhluk lain. Manusia tidak memiliki hak sewenang-wenang untuk mengelola lingkungan tanpa memikirkan konsekuensinya.

Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa konsekuensi dari masyarakat yang hanya berpendidikan rendah dan hanya memiliki pekerjaan sebagai nelayan ternyata menimbulkan kesadaran lingkungan yang kurang baik. Para nelayan tidak pernah memikirkan setiap konsekuensi akan bahaya lingkungan akibat hasil buangan sampah mereka di laut. Hal yang dilakukan saat ini adalah membuka peluang Kuliah Kerja Nyata (KKN) kepada kampus-kampus di wilayah Jabodetabek untuk memberikan sosialisasi terhadap bahaya lingkungan akibat sampah. Hal tersebut dilakukan oleh kelompok mahasiswa UGM yang memberikan program-program konstruktif untuk menjaga lingkungan dan memanfaatkan sampah dengan berbasis daur ulang.

Variabel lain, *security by what means*. Ancaman terhadap lingkungan memang tidak seperti ancaman tradisional seperti konflik dan perang yang langsung dirasakan konsekuensinya. Ancaman lingkungan sebagai maksud dari ancaman yang berbahaya bagi masyarakat. Pemaknaan ancaman lingkungan tidak *one shoot* seperti perang tetapi berkonsekuensi berkelanjutan. Contoh saja membuaNg sampah plastik seperti popok, bungkus *indomie*, dan sejenisnya bisa membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Belum lagi benda-benda tersebut terbawa oleh ombak dan dikonsumsi oleh biota laut dan kemudian dikonsumsi lagi oleh manusia maka bisa disimpulkan terganggunya kesehatan manusia akibat perilaku manusia itu sendiri.

Penulis melakukan FGD dengan WWF Jakarta disimpulkan beberapa hal yaitu, *Penggunaan kantong plastik 9M lembar pertahun, lebih parah lagi Satu orang menyumbang 700 lembar/ tahun. Lebih lanjut, 8 juta ton plastik ditemukan di lautan/ tahun itu artinya bahwa 1dari 3 spesies mamalia di laut bergulat dengan sampah plastic.WWF menyimpulkan bahwa Budaya Bahari dan pengelolaan ruang laut belum maksimal. Berikut ini adalah beberapa fakta ancaman keamanan lingkungan dari data WWF:*

security, food security health security, environmental security, personal security, community security, political security. Selain itu dalam mahzab Kanada *people centered security* itu menyangkut *security again economic privation, an acceptable access quality of life, and a guarantee of fundamental human right.* Hal tersebut menunjukkan *basic needs, sustain economic, development, fundamental freedoms- freedom from fear and freedom for want, the rule of the law, good governance, social development and social aquality.* Apabila dikontekstualkan dengan isu di atas, nilai ancaman keamanan lingkungan akibat sampah plastic akan berpengaruh terhadap nilai lain yang telah di tetapkan oleh UNDP.

Keamanan lingkungan merupakan salah satu indikator UNDP untuk mengukur bahwa masyarakat negara bisa mendapatkan keamanan dari negara. Dengan demikian, apabila lingkungan terganggu terutama masyarakat pesisir akan berdampak pada kesehatan, pendapatan, akses individual atau kelompok. Pada intinya setiap individu memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan akses kehidupan yang sehat terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, budaya membuang sampah plastic di sembarangan tempat terutama di pesisir laut masih menjadi tanggung jawab semua pihak. Hal ini dibutuhkan kerjasama mendalam dan kolaborasi semua aktor untuk bisa mengelola laut yang berbasis ekologi dan keberlanjutan. Karena hampir sebagian besar masyarakat di pesisir pantai bekerja sebagai nelayan, dan apabila sumber pendapatannya tercemar maka akan sangat mengganggu kualitas hidup dan kesejahteraan mereka juga. Butuh kerjasama lintas sektoral baik NGO, masyarakat, pemerintah daerah dan negara dalam bentuk diplomasi bencana.

Penutup

Keamanan maritim sebagai *buzzword* tidak mengandung konsensus dalam pengertiannya. Keamanan maritim adalah usaha untuk melindungi wilayah teritori, infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan masyarakat dari sebuah negara dari ancaman yang terjadi di laut, termasuk perompakan. Salah satu persoalan keamanan maritim di Indonesia adalah limbah sampah di laut. Sebagai negara yang hendak mengukuhkan sebagai poros maritim dunia maka sudah semestinya menjadikan sampah di laut sebagai isu penting dan perlu mendapat perhatian serius. Riset dari *Ocean Conservancy* melaporkan bahwa sekitar 8 juta ton plastik lolos ke laut setiap tahun. Jika kondisi itu tak bisa dikendalikan, pada 2025 akan ditemukan sekitar 1ton sampah plastik di setiap 3ton ikan yang diambil dari laut. Sementara itu, dalam laporan riset yang dimuat di jurnal *Science* (2015), tim peneliti yang dipimpin Jenna R Jambeck dari Universitas Georgia menyatakan

sampah plastik yang mengalir ke laut bisa lebih besar. Kalkulasi data dari 192 negara menyebutkan Indonesia menempati peringkat kedua dengan produksi sampah plastik mencapai 3,2 juta ton setelah Tiongkok (8,8 juta ton), disusul Filipina (1,9 juta ton), Vietnam (1,8 juta ton), dan Sri Lanka (1,6 juta ton). Sekitar 83% sampah di Indonesia tidak dikelola dengan baik.

Di atas semua itu, ancaman keamanan limbah sampah di laut diperlukan langkah strategis, antara lain: a) Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang berhubungan dengan sosial ekonomi pesisir; b) Pengembangan Dukungan Kebijakan yakni mengembangkan kebijakan lintas sektoral yang kolaboratif serta dukungan kebijakan UU terkait wilayah pesisir maritime; c) Penetapan agenda program-program prioritas menyangkut *sovereignty*, *security*, dan *safety* serta *environmentality*. Kebijakan atau langkah-langkah ini diperlukan demi kepentingan *human security* yang basisnya *prosperity* dan *disaster*. Manajemen pengelolaan sampah di wilayah pesisir ini terutama yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara sangat penting mengingat makin merembaknya jumlah sampah plastik yang masuk di lautan Indonesia. Dengan dukungan sejumlah kebijakan di atas diharapkan mampu meminimalisir masuknya sampah plastik baik karena sampah kiriman dari laut, akibat perilaku kunjungan wisatawan. Dengan demikian, diharapkan mampu menciptakan ekosistem laut yang baik dan berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Daftar Pustaka

Buzan, Barry., and Ole Wæver and Jaap de Wilde. *Security: A New framework For Analysis*. Boulder : Lynne Rienner Publisher, 1998.

Bueger, C. "What is Maritime Security?," *Marine Policy*, 2015

Buzan, B. *People State and Fear : An Agenda For International Security Studies In the Post Cold War Era* . Hemstead Harvester Wheatsheaf, 1991.

Carlesnaes, W. *Handbook Hubungan Internasional Terjemahan*. Bandung: Nuansa, 2013.

Dam, S . *Politik Kelautan*. Jakarta. : Bumi Aksara, 2010.

Fathun, Muhammad Laode, & Yugo Lastarob Khomeini,dkk. *Keamanan Kontemporer di Asia Tenggara*, Jakarta : Sulu Media Graha Ilmu, 2018.

Inu Kencana, Syafii,. *Ekologi Pemerintahan Indonesia*, Jakarta:Kompas Gramedia, 2019.

Keliat, Makmur. "Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia," *Ilmu sosial dan Ilmu Politik*, Volume.13, No.1 (Juli 2009): 113.

Nicholas, Loy Dkk. *Melancong Ke Laut*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2019.

Miller, S. M..J. *Global Dangers Changing Dimmensions of International Security* . Cambridge : MTT Press, 1995.

Mochamad Yani,Yanyan dan Ian, Moersetama. *Pengantar Studi Keamanan*. Malang : Intrans Publishing, 2017.

Nurdin, R. A. *Keamanan Global*. Bandung: Alfabeta, 2015.

O'Callghan, M. G. *International Relations :the key concepts*. New York: Routledge, 2002.

Remacle, Eric "Approaches To Human Security: Japan, Canada, And Europe In Comparative Perspective, " *The Journal Social Science*, 66, (2008)

Siadari,Eben E., *Esensi PraktekMenulis*,Jakarta:Kompas Gramedia, 2019.

Siswanto. *Kembali Melaut : Industri dan Jasa Mritim Dalam Visi Poros Maritim Dunia*. Yogyakarta: Kemenko Maritim dan PuSshankam UPN" Veteran " Yogyakarta, 2016.

Smith, J. B. *Globalization of World Politics : An Introduction to International Relation* . United Kingdom : Oxford University Press, 2001.

Susanto, M. ., *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut, Berbasis Sistem Peringatan Dini* . Jakarta: Gramedia, 2015.

Taufiqerrochman, Achmad ,*Kepemimpinan Maritim Sebuah Memoar*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2019.

Dewan Guru Besar. *Proseding Kongres Maritim Ke II*. Yogyakarta: Dewan Guru Besar UGM, 2017.

Ullman, Richard H, "Redefining Security," *International Security*, Vol. 8, No. 1 (Summer, 1983).

Wahyono, S. *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta.: Teraju, 2009.

Waluyo ,Cipto. *Menggalang Ketahanan Nasional*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2019.